

Article

# Implementasi Wathaniyah dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren: Studi di Pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto

**Budiyono Santoso**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Riyadlul Jannah, Mojokerto,  
Indonesia; email : budiyonosantoso@rijan.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF  
RELIGION AND SOCIETY  
Vol. 5, Issue 1, January 2026

ISSN 2962-7958

Page : 147-163

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.799>

Copyright

© The Author(s) 2026



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution 4.0  
International License](#)

## Abstract

*This study aims to analyze the implementation of wathaniyah (religious-based nationalism) in fostering institutional independence at Pesantren Riyadlul Jannah. Departing from the understanding that pesantren serve not only as religious educational institutions but also as socio-national actors, wathaniyah is positioned as a religious value with social and institutional implications. The research employs a qualitative phenomenological approach through in-depth interviews, observation, and documentation, and the data were analyzed using thematic-phenomenological techniques. The findings reveal that wathaniyah functions as both a normative and ideological foundation for pesantren independence. Love of the homeland is understood as part of faith and religious responsibility, manifested in economic autonomy, social welfare commitments, and active contributions to national development. Such independence is not perceived as a purely pragmatic objective but as a means to safeguard the pesantren's ethical autonomy and freedom of service to society and the state. This study demonstrates that wathaniyah operates as a religious ethic that drives pesantren empowerment. The findings contribute to the fields of religious and social studies by showing how contextualized religious values can serve as normative foundations for strengthening pesantren roles within Indonesian civic life.*

## Keyword

*Civic participation, nationalism, pesantren, religious ethics, social capital*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi wathaniyah dalam mewujudkan kemandirian kelembagaan di Pesantren Riyadlul Jannah. Berangkat dari asumsi bahwa pesantren merupakan aktor keagamaan sekaligus kebangsaan, penelitian ini memposisikan wathaniyah sebagai nilai keagamaan yang memiliki implikasi sosial dan kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wathaniyah berfungsi sebagai landasan normatif dan ideologis bagi pembangunan kemandirian pesantren. Nilai cinta tanah air dipahami sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab keagamaan, dan diwujudkan dalam kemandirian ekonomi, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kemandirian dimaknai bukan sekadar tujuan pragmatis, tetapi sebagai cara menjaga otonomi nilai dan kebebasan pengabdian pesantren kepada umat dan bangsa. Studi ini menegaskan bahwa wathaniyah dapat berperan sebagai etika keagamaan yang mendorong kemandirian pesantren. Temuan ini memperkaya kajian agama dan sosial dengan menunjukkan bahwa nilai keagamaan mampu menjadi basis normatif bagi penguatan peran pesantren dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia.

**Kata Kunci**

Wathaniyah, kemandirian pesantren, Pesantren dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme, pembangunan nasional

**Pendahuluan**

Pesantren merupakan salah satu institusi keagamaan tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah sosial Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era kontemporer, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pusat pembentukan kesadaran sosial, moral, dan kebangsaan umat. Dalam sejarah perjuangan nasional, pesantren dan para kiai memiliki peran signifikan dalam menjaga eksistensi bangsa, mulai dari perlawanan terhadap kolonialisme hingga kontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta historis seperti Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 menegaskan bahwa nasionalisme pesantren memiliki akar teologis dan sosiologis yang kuat (Ariev, 2025; van Bruinessen, 1999).

Dalam tradisi pesantren, cinta tanah air atau *wathaniyah* bukanlah konsep asing. Prinsip *hubbul wathan minal iman* telah lama menjadi narasi keagamaan yang menempatkan kecintaan terhadap tanah air sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab spiritual. Nilai ini merupakan refleksi dari “Trilogi Ukhuwah” gagasan KH Ahmad Shiddiq, yang mengintegrasikan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan manusia) (Slamet, 2017). Sejumlah ulama menegaskan bahwa keterikatan emosional terhadap tanah air merupakan fitrah manusia yang diakui Islam (al-Zuhaili, 1418; Al-‘Asqalani, 1994). Dalam konteks ini, *wathaniyah* diaktualisasikan melalui pembentukan generasi santri yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga

kedaulatan negara, mengembangkan masyarakat, dan berkontribusi pada kemajuan nasional sebagai bagian integral dari ibadah dan perjuangan (Alamsyah, 2024).

Disisi lain pesantren kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi ekonomi, ketergantungan pada bantuan eksternal, serta meningkatnya biaya operasional pendidikan telah mendorong banyak pesantren berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi. Ketergantungan finansial tidak jarang berdampak pada melemahnya otonomi pesantren dalam menentukan arah pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial (Kemenag RI, 2021). Dalam situasi ini, wacana tentang kemandirian pesantren menjadi semakin relevan, tidak hanya sebagai kebutuhan praktis, tetapi juga sebagai persoalan etis dan ideologis.

Dalam kerangka inilah, aktualisasi nilai *wathaniyah* menemukan relevansinya yang konkret. Konsep cinta tanah air memiliki potensi normatif sebagai nilai penggerak dalam praksis kelembagaan pesantren, terutama dalam pengembangan dan penguatan kemandirian ekonomi. Wathaniyah menuntut pesantren untuk tidak berada dalam posisi pasif sebagai penerima bantuan, melainkan tampil sebagai subjek pembangunan yang mandiri, berdaya, dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan bangsa. Kemandirian ekonomi pesantren, dengan demikian, merupakan manifestasi langsung dari tanggung jawab kebangsaan yang berakar pada kesadaran teologis dan historis pesantren itu sendiri.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi pesantren berpotensi memperkuat peran sosial pesantren sekaligus menjaga martabat dan otonomi institusionalnya (Azra, 2018; Zarkasyi, 2012). Studi-studi mutakhir juga menegaskan bahwa kemandirian finansial menjadi prasyarat keberlanjutan pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan infrastruktur, dan memperluas peran pemberdayaan ekonomi masyarakat (Khatimah, Nuradi, & Huda, 2024; Solihin & Azro'i, 2024). Berbagai strategi, seperti pengelolaan usaha pesantren, wakaf tunai, dan penguatan kepemimpinan kewirausahaan, menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun secara berkelanjutan tanpa menghilangkan karakter keagamaan pesantren (Adamin, Firdaus, & Ali, 2025).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, kemandirian pesantren umumnya masih dipandang melalui kacamata manajerial dan ekonomi sebagai instrumen keberlanjutan lembaga. Namun, sebagai institusi yang sarat nilai, kemandirian ekonomi pada hakikatnya merupakan ekspresi dari orientasi normatif dan etika sosial yang hidup dalam tradisi pesantren. Artikel ini berargumen bahwa kemandirian tersebut tidak dapat dilepaskan dari internalisasi nilai *wathaniyah* (cinta tanah air), di mana semangat kebangsaan tidak lagi berhenti pada retorika, melainkan diwujudkan dalam upaya nyata membangun kedaulatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Pesantren Riyadlul Jannah menjadi manifestasi nyata dari integrasi

nilai tersebut. Di lembaga ini, nilai *wathaniyah* diinternalisasikan melalui praktik budaya yang kuat yang kemudian bertransformasi menjadi etos kerja dalam mengelola unit-unit usaha profesional. Karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi *wathaniyah* menjadi penggerak utama kemandirian di Pesantren Riyadlul Jannah. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi makna cinta tanah air oleh aktor pesantren, proses internalisasinya dalam pendidikan, hingga manifestasinya dalam praktik ekonomi dan kontribusi sosial. Melalui pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian agama dan sosial mengenai peran nilai keagamaan sebagai basis etika dan praksis kemandirian institusi Islam di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis (Creswell & Poth, 2017), yang bertujuan untuk memahami makna nilai *wathaniyah* serta implementasinya dalam mewujudkan kemandirian pesantren sebagaimana dipahami dan dialami oleh aktor-aktor pesantren. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berupaya mendeskripsikan praktik kemandirian pesantren secara empiris, tetapi juga menggali kesadaran, pemaknaan, dan orientasi nilai keagamaan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Penelitian dilaksanakan di Pesantren Riyadlul Jannah yang dipilih secara purposif karena menunjukkan praktik kemandirian ekonomi dan sosial yang kuat serta secara eksplisit menjadikan nilai *wathaniyah* sebagai dasar pengembangan kelembagaan pesantren. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, pengelola unit usaha, tokoh akademik, serta santri yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan pengabdian sosial, dilengkapi dengan observasi terhadap praktik keseharian pesantren dan penelaahan dokumen seperti syi'ir kebangsaan, arsip kegiatan pesantren, serta catatan kontribusi sosial dan ekonomi.

Analisis data dilakukan secara tematik-fenomenologis melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, dan penafsiran makna untuk mengungkap hubungan antara nilai *wathaniyah* dan praktik kemandirian pesantren. Proses analisis dilakukan secara reflektif dan berulang agar temuan penelitian merepresentasikan secara utuh pengalaman dan pemaknaan para informan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data, serta dengan membandingkan konsistensi makna antar-informan dan antar-sumber data. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai *wathaniyah* diinternalisasikan dan diwujudkan dalam bentuk kemandirian ekonomi, komitmen kesejahteraan sosial, dan kontribusi aktif pesantren terhadap pembangunan nasional.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Implementasi Wathaniyah dalam Praktik Kelembagaan dan Kemandirian Pesantren*

### 1. *Wathaniyah sebagai Dasar Ideologis Kemandirian Pesantren*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Pesantren Riyadlul Jannah, nilai *wathaniyah* tidak hanya dipahami sebagai nilai yang bersifat normatif, tetapi telah berkembang menjadi dasar ideologis dalam membangun kemandirian pesantren. Cinta tanah air diposisikan sebagai prinsip fundamental yang mengarahkan visi, kebijakan, dan praktik kelembagaan pesantren, khususnya dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Para pengasuh dan pengelola pesantren memandang bahwa kemandirian pesantren merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pengabdian yang utuh kepada agama dan bangsa.

Ideologi kemandirian tersebut secara konsisten ditanamkan melalui berbagai medium kultural dan pedagogis pesantren. Salah satu yang paling menonjol adalah syi'ir kebangsaan karya pendiri pesantren, KH. Mahfudz Saubari yang dijadikan rujukan normatif dalam pengembangan pesantren. Bait-bait yang sarat semangat kebangsaan ini berbunyi:

Kapan bangsa biasa danai negara,  
Penguasa terima amanat bangsa,  
Tidak mudah didekte oleh preman,  
Bilang membantu tapi ada tujuan.

Mandiri tak bergantung siapa saja,  
Kecuali Allah yang Maha Kuasa,  
Cendekiawan, habaib, para Kyai,  
Selalu mandiri, memberi, menyontohi.

Cermin karakter bangsa bermartabat,  
Di negeri kaya jaya yang berdaulat."

Bait-bait syi'ir itu menegaskan pentingnya bangsa yang mampu mendanai dirinya sendiri serta tidak mudah didikte oleh kekuatan luar. Ini menjadi refleksi ideologis dari pandangan pesantren terhadap relasi antara ketergantungan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Dalam perspektif ini, ketergantungan dipahami tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap martabat dan kebebasan bangsa. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kedaulatan nasional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh penafsiran para tokoh pesantren terhadap relasi antara memberi dan ketundukan, sebagaimana diungkapkan melalui konsep *al-insan 'abd al-ihsan*. Manusia, dalam pandangan ini, cenderung tunduk kepada pihak yang memberinya bantuan. Oleh sebab itu, ketergantungan ekonomi—baik pada individu, korporasi, maupun kekuatan eksternal—dipahami berpotensi melemahkan kemandirian sikap dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Kesadaran inilah yang mendorong

Pesantren Riyadlul Jannah untuk menempatkan kemandirian sebagai prinsip ideologis, bukan sekadar strategi teknis pengelolaan lembaga (Milal, 2024).

Wathaniyah sebagai dasar ideologis kemandirian pesantren juga tercermin dalam visi pendiri pesantren yang ingin menjadikan pesantren sebagai entitas yang mampu menopang dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi negara. Inspirasi dari pengalaman lembaga-lembaga Islam internasional, seperti Al-Azhar di Mesir, dipadukan dengan konteks kebangsaan Indonesia, sehingga melahirkan gagasan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang mandiri dan produktif. Dalam konteks ini, kemandirian pesantren dipahami sebagai wujud nyata dari *hubbul wathan minal iman*, di mana cinta tanah air diwujudkan melalui kemampuan lembaga keagamaan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan berkontribusi bagi kemaslahatan bangsa (Abdullah, 2024).

Pemaknaan wathaniyah tersebut juga diterjemahkan lebih lanjut dalam pandangan pengasuh pesantren mengenai bentuk konkret implementasi cinta tanah air. Cinta tanah air, menurut KH. Mahfudz Saubari sebagaimana dituturkan oleh Putranya, Mokhammad Ainur Rofiq, tidak cukup dimaknai sebagai loyalitas simbolik terhadap negara, tetapi harus diaktualisasikan melalui upaya mengelola dan mengembangkan kekayaan alam di berbagai bidang agar mampu melahirkan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Pandangan ini menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan, sekaligus sebagai arena pengabdian pesantren terhadap negara (Rofiq, 2024).

Gagasan tersebut secara eksplisit tercermin dalam bait-bait syi'ir kebangsaan karya K.H. Mahfudz yang menjadi rujukan ideologis di Pesantren Riyadlul Jannah. Dalam salah satu syi'irnya ditegaskan:

Nusantara ini anugerah ilahi  
Untuk orang yang iman mau mengabdikan  
Cinta tanah air harus mengembangkan  
Kekayaan alam di berbagai bidang  
Berdiri sendiri dan mempertahankan  
Daulat kebangsaan dan kenegaraan

Bait-bait tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air dipahami sebagai kesediaan untuk mengelola anugerah ilahi berupa kekayaan alam secara mandiri dan bertanggung jawab. Nusantara diposisikan sebagai amanah dari Allah yang harus disyukuri, dijaga, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dipandang sebagai jalan menuju kedaulatan bangsa.

Ahsanul Milal menjelaskan bahwa syi'ir tersebut mengandung ajakan teologis untuk memandang Indonesia sebagai anugerah terbesar dari Allah SWT. Mensyukuri anugerah tersebut, menurutnya, tidak cukup



dengan pengakuan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia mengutip definisi syukur dalam tradisi keilmuan Islam sebagai “shorfun ni‘ami lima khuliqa li ajliha”, yakni memanfaatkan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Dalam konteks kebangsaan, hal ini berarti bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan kemandirian bangsa. Karena itu, Milal menegaskan bahwa tugas para pendidik, cendekiawan, habaib, dan kiai adalah mencetak generasi yang memiliki kesiapan moral, intelektual, dan keterampilan untuk mengelola kekayaan Indonesia secara mandiri dan berdaulat (Milal, 2024).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa semangat kebangsaan dan cinta tanah air menjadi fondasi utama dalam pengembangan entrepreneurship di Pesantren Riyadlul Jannah. K.H. Mahfudz menekankan bahwa entrepreneurship pesantren tidak semata-mata berorientasi pada pengelolaan bisnis, tetapi merupakan bentuk implementasi rasa syukur atas nikmat Allah berupa kekayaan alam Indonesia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi pesantren dipahami sebagai ibadah sosial yang mengintegrasikan dimensi spiritual, ekonomi, dan kebangsaan.

Dalam kerangka pemikiran Pesantren Riyadlul Jannah, *wathaniyah* berfungsi sebagai landasan ideologis yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kesadaran kebangsaan, dan praksis kemandirian kelembagaan. Melalui kerangka ini, pengembangan unit-unit usaha pesantren diposisikan sebagai ikhtiar keagamaan sekaligus kebangsaan untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi secara mandiri. Entrepreneurship tidak semata dimaknai sebagai aktivitas ekonomi atau sarana pencarian keuntungan, melainkan sebagai wujud konkret pengabdian pesantren dalam menjaga kedaulatan ekonomi, memperkuat kemakmuran masyarakat, dan menegaskan perannya sebagai aktor strategis dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, cinta tanah air di Pesantren Riyadlul Jannah menemukan bentuk praksisnya dalam upaya sistematis membangun kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai keagamaan dan berorientasi pada kepentingan nasional.

## **2. Implementasi Wathaniyah dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai *wathaniyah* di Pesantren Riyadlul Jannah juga diwujudkan secara konkret dalam pembangunan kemandirian ekonomi pesantren. Kemandirian ekonomi dipandang sebagai bentuk aktualisasi cinta tanah air yang bersifat praksis, di mana pesantren berupaya melepaskan diri dari ketergantungan finansial sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kewirausahaan pesantren tidak dimaknai sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari pengabdian keagamaan dan kebangsaan.

Implementasi nilai tersebut tercermin dari visi pendiri pesantren yang sejak awal menempatkan kemandirian ekonomi sebagai pilar utama pengembangan lembaga. Ainur Rofiq, salah satu pengasuh pesantren,

menuturkan bahwa pendirian Pesantren Riyadlul Jannah terinspirasi dari kisah Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Ia menyampaikan bahwa pesantren idealnya tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga mampu menopang negara melalui kontribusi ekonomi. Rifiq menegaskan bahwa “mendirikan pesantren yang dapat mendanai negara melalui kontribusi pajak merupakan wujud nyata dari cinta tanah air.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan pesantren diposisikan sebagai bagian dari implementasi *hubbul wathan minal iman*, di mana cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab fiskal dan kemandirian ekonomi.

Implementasi nilai wathaniyah dalam pembangunan kemandirian ekonomi Pesantren Riyadlul Jannah diwujudkan melalui pengembangan unit-unit usaha yang terintegrasi dengan sistem pendidikan pesantren. Pesantren ini memandang kewirausahaan sebagai bagian dari strategi kelembagaan untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sebagai sarana pendidikan praksis bagi santri. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari misi pendidikan dan pembentukan karakter, melainkan dirancang sebagai wahana internalisasi nilai kemandirian, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kebangsaan. Karena itu, pesantren Riyadlul Jannah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan internal lembaga, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Unit-unit usaha pesantren berperan dalam menyediakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi santri.

Secara kelembagaan, Pesantren Riyadlul Jannah mendirikan PT Rijan Dinamis Selaras (RDS) sebagai badan usaha yang menaungi berbagai unit bisnis pesantren. Unit-unit usaha tersebut mencakup beragam sektor strategis, seperti kuliner, properti, wedding organizer, perjalanan wisata, konveksi, jasa rental, pertanian organik, produksi air mineral, peternakan, serta retail. Pengelolaan usaha dilakukan secara profesional dengan sistem manajemen modern, namun tetap berlandaskan nilai-nilai pesantren (Basri, 2017; Syafi'i, 2019). Model ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi pesantren dibangun melalui diversifikasi usaha yang memanfaatkan potensi lokal dan kebutuhan pasar, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif.

Selain berdampak secara ekonomi, model kewirausahaan Pesantren Riyadlul Jannah juga memperoleh pengakuan dari berbagai institusi nasional. Pada tahun 2015, pesantren ini menerima penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai *Pioneer Kemandirian Pesantren*, serta masuk dalam daftar sepuluh besar eko-santri pionir kemandirian pesantren versi Kementerian Agama Republik Indonesia (Basri, 2017). Pengakuan serupa juga diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui penghargaan *Arus Baru Ekonomi Indonesia* (ABEI) pada tahun 2019 dalam kategori Pondok Pesantren Penggerak Ekonomi Umat (Mashadi, 2020; OpopJatim, 2020). Berbagai penghargaan tersebut menegaskan bahwa implementasi wathaniyah dalam bentuk kemandirian ekonomi pesantren tidak hanya bersifat internal,



tetapi juga diakui sebagai praktik baik dalam pengembangan ekonomi umat dan kebangsaan.

Dengan demikian, pembangunan unit-unit usaha yang terintegrasi dengan pendidikan pesantren di Pesantren Riyadlul Jannah menunjukkan bahwa nilai wathaniyah berfungsi sebagai kerangka ideologis yang menghubungkan nilai keagamaan, kesadaran kebangsaan, dan praktik kemandirian kelembagaan. Kewirausahaan pesantren tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga medium pendidikan dan pengabdian yang menegaskan peran pesantren sebagai aktor strategis dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

### **3. Implementasi Wathaniyah sebagai Komitmen Kesejahteraan Sosial**

Implementasi nilai *wathaniyah* di Pesantren Riyadlul Jannah tidak hanya diwujudkan dalam kemandirian ekonomi lembaga, tetapi juga dalam komitmen kuat terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Kemandirian pesantren dipahami sebagai sarana untuk memperluas manfaat sosial dan memperkuat peran pesantren sebagai institusi keagamaan yang hadir secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, cinta tanah air dimaknai sebagai tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup umat dan masyarakat secara luas.

Komitmen tersebut kemudian terwujud secara konkret dalam kiprah Pesantren Riyadlul Jannah dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai unit usaha pesantren. Ahsanul Milal menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi dirancang secara inklusif dengan mensinergikan beragam potensi yang dimiliki masyarakat, baik berupa gagasan, modal, keterampilan, maupun tenaga kerja. Setiap individu diberi ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya, baik sebagai konseptor, pelaksana usaha, mitra bisnis, maupun pekerja, sehingga terbangun relasi ekonomi yang berbasis kebersamaan dan saling menguatkan (Milal, 2025).

Bagi masyarakat yang memiliki modal, pesantren membuka peluang kepemilikan saham pada unit-unit usaha pesantren sebagai bentuk kemitraan ekonomi yang adil. Sementara itu, masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu difasilitasi untuk mengembangkan keahliannya melalui keterlibatan langsung dalam unit usaha yang relevan. Bahkan mereka yang tidak memiliki modal maupun keterampilan khusus tetap dilibatkan melalui penyediaan lapangan kerja, sehingga pesantren berperan langsung dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan mengurangi kerentanan sosial di lingkungan sekitarnya.

Lebih jauh, pesantren juga berperan sebagai agen transformasi ekonomi modern dengan membina masyarakat agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar kontemporer. Prof. Imam Suprayogo, Pembina Pesantren Riyadlul Jannah, menegaskan bahwa masyarakat Pacet, yang sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi lemah, dilibatkan secara

aktif dalam rantai usaha pesantren, khususnya di sektor pertanian. Melalui pendampingan, pelatihan, dan pengenalan standar operasional pertanian modern, para petani dibantu agar hasil pertanian mereka—seperti kentang dan sayur-mayur—dapat menembus pasar ritel modern. Upaya ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk pertanian, tetapi juga memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar petani lokal.

Selain itu, pesantren secara aktif berperan dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial. Pesantren Riyadlul Jannah rutin terlibat dalam kegiatan keagamaan masyarakat, bantuan sosial, serta dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan dan kebencanaan. Praktik ini dipahami sebagai wujud pengabdian kepada bangsa yang berangkat dari nilai keislaman dan kebangsaan. Ahsanul Milal menjelaskan bahwa kemandirian pesantren memungkinkan lembaga ini untuk bergerak cepat dan mandiri dalam merespons kebutuhan sosial tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar.

Komitmen kesejahteraan sosial juga tercermin dalam pendidikan santri. Santri tidak hanya dibekali pengetahuan agama dan keterampilan kewirausahaan, tetapi juga ditanamkan kesadaran sosial dan tanggung jawab kebangsaan. Melalui keterlibatan langsung dalam unit usaha dan kegiatan sosial pesantren, santri dilatih untuk memahami bahwa keberhasilan ekonomi harus diiringi dengan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, nilai wathaniyah ditanamkan sebagai kesadaran etis yang mendorong santri untuk berkontribusi bagi kesejahteraan sosial setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi wathaniyah sebagai komitmen kesejahteraan sosial memperkuat posisi pesantren sebagai agen pembangunan sosial. Kemandirian ekonomi yang dimiliki Pesantren Riyadlul Jannah memungkinkan pesantren menjalankan fungsi redistributif dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Cinta tanah air tidak dipahami sebagai retorika kebangsaan semata, melainkan sebagai dorongan moral untuk memastikan bahwa keberadaan pesantren memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial. Dengan demikian, wathaniyah berfungsi sebagai nilai pengikat yang menghubungkan kemandirian ekonomi dengan pengabdian sosial pesantren dalam konteks kebangsaan.

### ***Kemandirian Pesantren sebagai Kontribusi Aktif terhadap Pembangunan Nasional***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Pesantren Riyadlul Jannah tidak hanya berdampak pada penguatan internal lembaga dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan nasional. Dalam perspektif pesantren, pembangunan nasional tidak semata-mata dimaknai sebagai proyek negara yang bersifat struktural, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk institusi keagamaan. Oleh karena itu, kemandirian pesantren dipahami sebagai prasyarat agar pesantren dapat berperan

secara mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Kontribusi tersebut tampak nyata melalui partisipasi pesantren dalam sistem ekonomi dan fiskal negara. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Imam Suprayogo, Pesantren Riyadlul Jannah secara konsisten memberikan kontribusi pajak dalam jumlah signifikan kepada negara. Ia menuturkan bahwa “setiap bulan pesantren ini menyeter ratusan juta rupiah pajak, sehingga dalam satu tahun kontribusinya bisa mencapai lima hingga enam miliar rupiah.” Fakta ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif yang menopang keuangan negara. Dalam perspektif pengelola pesantren, kepatuhan pajak tersebut merupakan wujud konkret cinta tanah air dan kesadaran kebangsaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Keberhasilan pengembangan unit-unit usaha pesantren tersebut menjadi fondasi penting bagi kontribusi pesantren terhadap negara. Kemandirian ekonomi yang terbangun tidak hanya menjamin keberlanjutan finansial lembaga, tetapi juga memungkinkan pesantren berpartisipasi secara langsung dalam sistem ekonomi dan fiskal nasional. Kontribusi ini tercermin dari kewajiban pajak yang dibayarkan oleh unit-unit usaha Pesantren Riyadlul Jannah kepada pemerintah, yang dilaporkan mencapai sekitar Rp600–700 juta per bulan atau setara dengan Rp5–6 miliar per tahun (Republika, 2017). Data ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi pesantren tidak dipahami semata sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan internal lembaga, melainkan sebagai wujud tanggung jawab kebangsaan dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, aktivitas ekonomi pesantren tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan institusi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kedaulatan ekonomi negara.

Selain kontribusi fiskal, kemandirian pesantren juga berperan dalam penguatan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan kewirausahaan dan keterlibatan santri dalam unit-unit usaha pesantren, Pesantren Riyadlul Jannah berkontribusi dalam mencetak generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan, tetapi juga kemandirian ekonomi dan etos kerja. Gus Ahsan menegaskan bahwa santri perlu dibekali kemampuan untuk “hidup mandiri dan memberi manfaat bagi negara, bukan menjadi beban pembangunan.” Pandangan ini menunjukkan bahwa pesantren memandang pembangunan nasional sebagai proses jangka panjang yang memerlukan investasi pada kualitas manusia (Milal, 2025).

Kemandirian pesantren juga berkontribusi pada penguatan stabilitas sosial, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Dengan menciptakan lapangan kerja, memberdayakan ekonomi lokal, dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pesantren berperan dalam mengurangi potensi kesenjangan dan konflik sosial. Dalam pandangan pengelola pesantren, stabilitas sosial merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dan

sosial pesantren dirancang tidak hanya untuk kepentingan lembaga, tetapi juga untuk menciptakan harmoni sosial di tingkat lokal dan nasional.

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Pesantren Riyadlul Jannah memperkuat posisi pesantren sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan. Dengan kemandirian ekonomi dan otonomi kelembagaan, pesantren memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi, berkontribusi, dan bersinergi dengan berbagai program pembangunan tanpa kehilangan independensi nilai. Dalam konteks ini, pesantren tidak diposisikan sebagai subordinat negara, melainkan sebagai aktor masyarakat sipil yang berperan aktif dalam pembangunan nasional berbasis nilai keagamaan dan kebangsaan.

Dengan demikian, kemandirian pesantren di Pesantren Riyadlul Jannah menunjukkan bahwa implementasi wathaniyah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Melalui kontribusi fiskal, penguatan sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan kemitraan strategis dengan negara, pesantren membuktikan bahwa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui praktik kelembagaan yang nyata dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai pilar pembangunan nasional yang berakar pada nilai-nilai Islam dan tradisi kebangsaan Indonesia.

#### **Wathaniyah sebagai Landasan Normatif Kemandirian Pesantren**

Temuan penelitian pada subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa kemandirian Pesantren Riyadlul Jannah—baik dalam aspek ekonomi, komitmen kesejahteraan sosial, maupun kontribusi terhadap pembangunan nasional—tidak semata-mata lahir dari pertimbangan pragmatis atau manajerial. Praktik-praktik tersebut berakar pada nilai wathaniyah yang dipahami sebagai bagian integral dari ajaran Islam dan tradisi pesantren. Dalam perspektif teori sosial-keagamaan, orientasi kebangsaan yang berbasis nilai keagamaan ini dapat dipahami sebagai bentuk *civic religion* yang menempatkan agama sebagai sumber motivasi moral bagi keterlibatan warga dalam urusan publik (Bellah, 2002). Oleh karena itu, wathaniyah dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan legitimasi etis dan religius bagi upaya pesantren membangun kemandirian dan peran sosialnya.

Secara normatif, Islam mengakui keterikatan manusia terhadap tanah air sebagai bagian dari fitrah. Al-Qur'an menggambarkan beratnya perintah meninggalkan kampung halaman sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 66, yang menunjukkan bahwa tanah air memiliki kedudukan emosional dan eksistensial yang mendalam bagi manusia. Demikian pula QS. al-Qashash ayat 85 dipahami oleh para mufasir sebagai pengakuan atas kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap Makkah setelah hijrah. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air bukanlah sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan realitas kemanusiaan yang diakui dan dihargai oleh wahyu. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW semakin memperkuat legitimasi tersebut. Ungkapan Nabi tentang kecintaannya

kepada Makkah dan Madinah menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan sikap yang sah secara keagamaan. Dalam khazanah keilmuan Islam, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan bagian dari fitrah manusia yang tidak dinafikan oleh syariat, selama tidak melahirkan fanatisme sempit (al-Zuhaili, 1418). Sementara itu, Ibn Hajar al-'Asqalani menegaskan bahwa hadis-hadis tentang kecintaan Nabi kepada Madinah menjadi dasar disyariatkannya mencintai dan menyayangi tanah air (Al-'Asqalani, 1994). Dengan demikian, wathaniyah memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Dalam konteks sosial-politik, fenomena ini sejalan dengan kajian global mengenai *religious nationalism* yang menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai basis legitimasi bagi identitas nasional, orientasi kewargaan, dan mobilisasi kepentingan publik (Juergensmeyer, 2023). Dalam konteks Indonesia, legitimasi normatif tersebut mengalami kontekstualisasi historis melalui tradisi pesantren. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 merupakan bukti nyata bagaimana cinta tanah air dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang menuntut tindakan nyata demi menjaga kedaulatan bangsa. Selain itu, konsep ukhuwah wathaniyah yang dirumuskan oleh KH. Ahmad Shiddiq menegaskan bahwa persaudaraan kebangsaan merupakan bagian dari etika sosial Islam yang relevan dalam masyarakat majemuk. Tradisi ini membentuk karakter pesantren sebagai institusi keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada kesalehan individual, tetapi juga pada tanggung jawab kebangsaan (Ariev, 2025).

Dalam kerangka normatif inilah praktik kemandirian Pesantren RiyadlulJannah dapat dipahami secara lebih utuh. Kemandirian ekonomi yang diwujudkan melalui pengembangan unit-unit usaha, kepatuhan fiskal, dan pemberdayaan kewirausahaan santri bukan sekadar strategi kelembagaan, melainkan ekspresi konkret dari wathaniyah. Dalam literatur ekonomi-keagamaan, praktik seperti ini dapat diposisikan sebagai bagian dari *faith-based social entrepreneurship* yang memandang aktivitas ekonomi sebagai misi moral dan pelayanan sosial, bukan semata pencarian keuntungan (Dana, 2010; Wuthnow, 2009). Kemandirian tersebut dipandang sebagai cara menjaga martabat pesantren, kebebasan pengabdian, serta kemampuan untuk berkontribusi secara mandiri bagi masyarakat dan negara. Dengan kemandirian ekonomi, pesantren menghindari ketergantungan yang berpotensi melemahkan otonomi nilai dan keberpihakan sosialnya.

Lebih jauh, komitmen pesantren terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional juga menemukan legitimasi normatifnya dalam konsep wathaniyah. Pemberdayaan masyarakat sekitar, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap stabilitas sosial dipahami sebagai wujud ukhuwah wathaniyah yang bersifat praksis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam memperkuat *social capital* masyarakat dan menjaga stabilitas sosial dalam konteks negara modern. Komunitas keagamaan sering kali mendorong peningkatan aktivitas usaha kecil, karena *social capital* memfasilitasi jejaring dan kolaborasi antarpelaku usaha (Deller, Conroy, & Markeson, 2018). Seperti kajian di



Turki, keterkaitan antara nilai kekeluargaan dan keagamaan dipandang sebagai sumber *social capital* yang vital, memperkuat kepercayaan dan kerja sama dalam masyarakat (Aydemir & Tecim, 2012). Demikian juga di Inggris, komunitas sinagoga berkontribusi terhadap masyarakat sipil melalui penyediaan layanan kesejahteraan serta mendorong kegiatan kerelawanan, yang pada gilirannya memperlambat keterikatan sosial (Harris, 2025).

Demikian pula partisipasi aktif pesantren dalam menopang pembangunan nasional—baik melalui kontribusi pajak maupun penguatan sumber daya manusia—dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi keagamaan dalam proyek pembangunan nasional. Dalam bahasa kajian pembangunan kontemporer, peran seperti ini menunjukkan bahwa institusi agama dapat berfungsi sebagai *non-state development actor* yang berkontribusi dalam agenda kesejahteraan negara (Hefner, 2009).

Dengan demikian, wathaniyah dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai ideologi sekuler atau sekadar simbol kebangsaan, melainkan sebagai etika keagamaan yang memberikan arah normatif bagi kemandirian pesantren. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian pesantren dapat dipahami sebagai ekspresi religius yang sah dan relevan, sekaligus sebagai kontribusi nyata pesantren dalam membangun bangsa. Integrasi antara nilai keagamaan, kesadaran kebangsaan, dan praktik kelembagaan yang ditunjukkan oleh Pesantren Riyadlul Jannah memperlihatkan model kemandirian pesantren yang berakar pada tradisi Islam dan responsif terhadap tantangan pembangunan nasional.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai wathaniyah dipahami, diinternalisasikan, dan diwujudkan dalam praktik kelembagaan Pesantren Riyadlul Jannah, khususnya dalam membangun kemandirian pesantren. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wathaniyah tidak dipahami sekadar sebagai simbol kebangsaan, melainkan sebagai landasan normatif yang berakar pada ajaran Islam dan tradisi pesantren. Legitimasi teologis yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama klasik, yang kemudian dikontekstualisasikan melalui sejarah pesantren Indonesia, membentuk pemahaman bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman dan tanggung jawab keagamaan. Dalam kerangka tersebut, wathaniyah berfungsi sebagai nilai etis yang menuntun sikap dan orientasi pesantren dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan kebangsaan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa wathaniyah diwujudkan secara praksis melalui pembangunan kemandirian ekonomi pesantren, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, serta kontribusi aktif terhadap pembangunan nasional. Kemandirian ekonomi memungkinkan pesantren menjaga otonomi nilai dan kebebasan pengabdian; pemberdayaan sosial memperkuat kohesi masyarakat; dan partisipasi fiskal serta penguatan sumber daya manusia menunjukkan kontribusi pesantren dalam agenda pembangunan nasional. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi



pada pengayaan kajian tentang hubungan antara agama, kebangsaan, dan pembangunan, khususnya dengan menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi dan partisipasi warga negara. Secara praktis, studi ini memberikan alternatif model pemberdayaan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada aspek manajerial, tetapi juga berakar pada etika keagamaan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu pesantren, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi studi dan menerapkan pendekatan komparatif untuk menilai variasi implementasi wathaniyah dalam konteks kelembagaan pesantren yang berbeda.

### Daftar Pustaka

- Abdullah. (2024, Desember). *Wawancara dengan Pengasuh PP Rijan*.
- Adamin, M., Firdaus, A., & Ali, Z. M. (2025). *Determinants of Successful Economic Independence in Pesantren | The Economic Review of Pesantren*. Retrieved from <https://journals.smartinsight.id/index.php/ERP/article/view/550>
- al-Zuhaili, W. (1418). *Al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj* (Vol. 5). Kairo: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir.
- Alamsyah, M. N. (2024, January 9). Trilogi Nasionalisme: Negara, Agama dan Pesantren. Retrieved 31 August 2024, from NU Online Jatim website: <https://jatim.nu.or.id/opini/trilogi-nasionalisme-negara-agama-dan-pesantren-FV4ux>
- Al-'Asqalani, I. H. (1994). *Fath al-Bari Sarh Sahih Bukhari* (Vol. 3). al-Maktabah as-Salafiyah.
- Ariev, H. (2025, Oktober). 80 Tahun Resolusi Jihad. Retrieved 22 January 2026, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/opini/80-tahun-resolusi-jihad-2fNSz>
- Aydemir, M. A., & Tecim, E. (2012). Türk Toplumunda Aile ve Dinin Sosyal Sermaye Potansiyeli. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (28), 43–59.
- Azra, H. (2018). Islamic Education in Indonesia. In *Handbook of Islamic Education* (pp. 763–780). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1\\_32](https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_32)
- Basri, H. H. (Ed.). (2017). *TOP 10 EKOSANTRI : Pionir Kemandirian Pesantren*. Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS.
- Bellah, R. (2002). 'Civil Religion in America'. In *Religion Today: A Reader*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Dana, L.-P. (Ed.). (2010). *Entrepreneurship and Religion*. Cheltenham (GB): Edward Elgar Publishing.

- Deller, S. C., Conroy, T., & Markeson, B. (2018). Social capital, religion and small business activity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 155, 365–381. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.09.006>
- Harris, M. (2025). *Synagogues and Their Role in UK Civil Society*. <https://doi.org/10.3167/ej.2025.580212>
- Hefner, R. W. (Ed.). (2009). *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Juergensmeyer, M. (2023). *The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State*. University of California Press.
- Kemenag RI. (2021, August 25). Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru; Retrieved 22 January 2026, from Kementerian Agama Republik Indonesia website: <https://kemenag.go.id/opini/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-barunbsp-mq46rj>
- Khatimah, H., Nuradi, & Huda, N. (2024). The Concept of Economic Independence of Cash Waqf-Based Pesantren and Its Implementation at STIBA Ar Raayah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5473–5492. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5402>
- Mashadi, A. I. (2020). Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Infaq Produktif Berbasis Kewirausahaan Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.19>
- Milal, A. (2024, Desember). *Wawancara dengan Pengasuh PP Rijan*.
- OpopJatim. (2020, November 27). Pesantren Riyadlul Jannah, Pionir Kemandirian Pesantren. Retrieved 4 August 2022, from <https://opop.jatimprov.go.id/> website: <https://opop.jatimprov.go.id/detail/189/pesantren-riyadlul-jannah-pionir-kemandirian-pesantren>
- Republika. (2017, January 22). Pesantren Sukses Bangun Wirausaha. Retrieved 13 August 2022, from Republika Online website: <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/17/01/22/ok68w64-pesantren-sukses-bangun-wirausaha>
- Slamet. (2017, February 2). Trilogi Ukhuwah: Fondasi Pembangunan Indonesia. Retrieved 31 August 2024, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/opini/trilogi-ukhuwah-fondasi-pembangunan-indonesia-42oXD>
- Solihin, K., & Azro'i, I. (2024). Strategi Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(1), 85–114. <https://doi.org/10.35878/santri.v5i1.1209>
- Syafi'i, S. (2019, September 11). Jejaring Bisnis ala Pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto. Retrieved 4 December 2022, from Nu.or.id website: <https://www.nu.or.id/nasional/jejaring-bisnis-ala-pesantren-riyadlul-jannah-mojokerto-L4Ed9>
- van Bruinessen, M. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (cetakan ke III). Bandung: Mizan.

- Wuthnow, R. (2009). *Saving America?: Faith-Based Services and the Future of Civil Society*. Princeton: Princeton University Press. Retrieved from <https://muse.jhu.edu/pub/267/monograph/book/29994>
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat: Refleksi tentang Islam, westernisasi & liberalisasi* (Cet. 1). Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations.